

**BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN SEKRETARIAT
DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jalan Jendral Sudirman Nomor 51 Padang (25113)



**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
TERM OF REFERENCE (TOR)**

KEGIATAN

FASILITASI MATERI DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

SUB KEGIATAN

FASILITASI KOMUNIKASI PIMPINAN

LOKASI

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

**TAHUN ANGGARAN
2022**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SATUAN KERJA	: BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN (KAK)
KEGIATAN	: FASILITASI KOMUNIKASI PIMPINAN SETDA/PROV. SUMBAR
PEKERJAAN	: PUBLIKASI KOMUNIKASI PIMPINAN
LOKASI	: JALAN JENDRAL PROGRAM PEMERINTAH
SUMBER DANA	: APBD PROV. SUMBAR
THN ANGGARAN	: 2022

Uraian Pendahuluan¹

1. Latar Belakang

Biro Administrasi Pimpinan (Biro Adpim) dibentuk berdasarkan aturan Permedagri nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur Dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kabupaten Kota dimana dijelaskan tupoksi Biro Adpim sebagai unit pelayanan, Pentaan dan Pengelolaan Materi dan Bidaang Protokol serta Perencanaa dan Kepegawajian Setdaprov Sumbar untuk mendukung san menunjang kegiatan pimpinan daerah.

Secara umum kegiatan Biro Adpim adalah membantu dan memfasilitasi berbagai aktifitas pimpinan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah guna menjaga komunikasi positif, meningkatkan kepercayaan publik. Sebagai salah satu Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan, melalui peran dan tugas melaksanakan bahan kebijjakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi didukung penyiapan materi pimpinan, publikasi dan dokumentasi pimpinan. Komunikasi pimpinan merupakan sub bagian yang bertugas melakukan kegiatan pimpinan, publikasi media cetak, media online, media sosial serta media luar ruang.

Guna mendorong pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance dan Clean Government),

¹ Uraian Pendahuluan memuat gambaran secara garis besar mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan.

transparansi, akuntabilitas, partisipatif dan demokratis. Oleh karena itu kondisi lingkungan internal dan eksternal yang kondusif sangat mempengaruhi tercapainya peningkatan kepercayaan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat serta dapat memberikan pelayanan informasi terbaik bagi masyarakat.

Meningkatnya kepercayaan masyarakat serta perhatian berbagai pihak baik ditingkat regional maupun secara nasional yang menempatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, juga berdampak pada kondisi pelaksanaan pembangunan daerah, informasi masyarakat yang kondusif, stabil, terkendali, aman dan tentram guna mendorong pertumbuhan ekonomi sektor ril dan meningkatnya pelaksanaan pembangunan di Sumatera Barat.

Begitupun dalam setiap penyelenggaraan Event Nasional di Sumatera Barat, Publikasi di media massa baik itu media cetak, media sosial, maupun media luar ruang memiliki peran yang sangat penting bagi kesuksesan sebuah Program Pemerintah. Berbagai informasi program dan keberhasilan pembangunan dan capaian yang telah dilakukan oleh Pemerintah.

Kegiatan Subbag Komunikasi Pimpinan bagian Materi Komunikasi Pimpinan Biro Administrasi Pimpinan selain memiliki fungsi sebagai penyebar informasi dari kegiatan Pimpinan Daerah publikasi juga berperan dalam mendukung tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah tersebarnya informasi pemerintah daerah melalui media cetak, media sosial dan media luar ruang.

Dalam membangun komunikasi dan meningkatkan kepercayaan publik, Subbagian Komunikasi Pimpinan juga melakukan Monitoring Media. Dalam melakukan aktivitasnya, Media Monitoring merupakan salah satu tugas yang menggambarkan sebagai proses evaluasi. Dimana sebuah publikasi di media dapat dikatakan berhasil saat feedback yang dihasilkan dari sebuah publikasi itu bernada positif. Untuk mengetahui keberhasilan ini maka perlu dilakukannya Media Monitoring dengan tujuan untuk membedah publikasi yang dilakukan melalui media. Selain itu media monitoring juga bermanfaat untuk membantu menentukan pengambilan kebijakan oleh pimpinan dan merupakan salah satu kegiatan yang penting dilakukan oleh seorang komunikator.

Proses pemantauan akan menghasilkan sebuah informasi tentang reputasi sebuah organisasi di mata media dan masyarakat. Dilakukan secara terus-menerus untuk melacak publikasi di media sosial.

Pengertian media monitoring adalah proses membaca, melihat, mendengarkan konten media online untuk kemudian diidentifikasi dan dianalisa terutama konten yang mengandung kata kunci atau topik tertentu sesuai dengan kebutuhan pemerintahan. Selain itu monitoring media juga mengumpulkan dan menggambarkan tren terkini media sosial.

Contohnya postingan, cuitan, hastag seseorang (tokoh publik, masyarakat, dll) di media sosial yang kemudian menjadi viral dan kemudian di angkat di media cetak, jika publikasi atau persoalan itu bernilai positif, akan baik-baik saja, lain halnya jika persoalan atau publikasi direspon negative oleh masyarakat, dan ini perlu disikapi dengan merespon dengan lebih cepat sehingga hal

negative tersebut tidak meluas dan tidak menjadi persoalan dalam pemerintahan.

kemudian, pemerintah sebagai sumber informasi harus lebih jeli melihat perkembangan media penyebaran informasi, dahulu media cetak sangat populer dan menjadi referensi masyarakat dalam mencari informasi, namun sekarang ini telah terjadi pergeseran dan ini bukan sudah bukan rahasia umum lagi bahwa kepopuleran media sosial saat ini sudah sangat pesat. Muncul jenis-jenis media sosial online dengan sangat beragam, mulai dari Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest dan banyak lagi. Dan semua media sosial ini pada fungsinya adalah sebagai media besosialisasi dan berkomunikasi satu sama lain. Tidak hanya itu, media sosial sudah menjadi media kreatifitas. Sudah banyak sekali orang-orang yang meraih kepopuleran melalui media sosial. Ada yang terkenal dengan karya berupa tulisan atau kicauan (tweet), ada yang terkenal dengan bakat fotografi, videografi.

Banyaknya media sosial yang bermunculan tidak terlepas dari dorongan jumlah pengguna internet. Pada Januari 2021, jumlah pengguna Internet di seluruh dunia mencapai 4,66 miliar, meningkat 316 juta (7,3%) dibandingkan periode yang sama tahun lalu. (sindonews.com).

Sedangkan pengguna internet di Indonesia berdasarkan data internetworldstats, mencapai 212,35 juta jiwa pada Maret 2021. Dengan jumlah tersebut, Indonesia berada di urutan ketiga dengan pengguna internet terbanyak di Asia.

Berdasarkan survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), menemukan bahwa media sosial merupakan layanan yang paling banyak diakses menggunakan internet kedua (87,13%) setelah layanan pesan singkat (89,35%).

Gohar F. Khan dalam bukunya *Social Media for Government* menyatakan bahwa secara sederhana, media sosial adalah sebuah platform berbasis internet yang mudah digunakan sehingga memungkinkan para pengguna untuk membuat dan berbagi konten (informasi, opini, dan minat) dalam konteks yang beragam (Informatif, Edukatif, Sindiran, Kritik dan sebagainya) kepada khalayak yang lebih banyak lagi. Oleh karena itu, media sosial mempunyai efek berantai sehingga proses transmisi yang terjadi tidak berhenti pada satu audiens pokok saja (multiplier effect).

Jika dihubungkan dengan pemerintahan, Media sosial untuk pemerintahan merupakan salah satu inovasi tata Kelola pemerintahan yang memaksimalkan teknologi. Pemanfaatan media sosial ini juga dapat menjadi salah satu jalan keluar permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat.

2. Maksud dan Tujuan

1. Mensosialisasikan dan mempublikasikan program dan Kegiatan Pimpinan kepada masyarakat
2. Menjaga citra positif pimpinan daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah
3. Meningkatkan kepercayaan publik dan mendorong peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan
4. Menyukseskan kebijakan dan program-program pembangunan Sumatera Barat sesuai RPJMD.
5. Meningkatkan daya saing potensi daerah guna mendorong

meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- 6. Memberikan pemahaman tentang pengelolaan media sosial yang efektif dan efisien.
- 7. Memberikan pemahaman dan teknik tentang cara mengoptimalkan media sosial agar lebih informatif dan komunikatif
- 8. Memberikan pelatihan tatacara membuat dan mengelola konten di media sosial

3. Sasaran

- 1. Tersosialisasikannya kegiatan pimpinan melalui media kepada Masyarakat
- 2. Masyarakat atau netizen, media sosial tidak saja di Sumatera Barat bahkan nasional.
- 3. Terkelolanya media sosial pemerintahan sebagai media komunikasi dengan masyarakat.

4. Lokasi Pekerjaan Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

5. Sumber APBD Prov. Sumbar tahun 2022

Pendanaan	Satuan Kerja	: Biro Administrasi Pimpinan Setda Prov. Sumbar.
6. Nama dan Organisasi Kuasa Pengguna Anggaran	KPA/PPK	: H E F D I, SH. M.Si
	Pejabat Pengadaan	NIP. 19640915 199003 1 007

Data Penunjang

7. Referensi Hukum

- a. UU Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Pemerintah Daerah.
- b. UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- c. UU No 40 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Pers
- d. PP Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
- e. PP Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Nomenklatur Dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota

